

=====

Jurnal Modal Sosial dan Ekonomi (Modali)

Edisi Desember 2019 Volume 3 Nomor 1

<https://ejournal.undova.ac.id/index.php/modali>

=====

**Evaluasi Kesesuaian Perencanaan APBD Kabupaten Sumbawa Barat
Melalui SiLPA Tahun 2010 – 2017**

Amir Ma'ruf

ustadzm@gmail.com

Fakultas Ekonomi Universitas Cordova

Taliwang Sumbawa Barat NTB

Abstrak: Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat selama delapan tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2017 menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk anggaran berimbang pada tahun 2011, anggaran surplus pada tahun 2015 dan 2016, selebihnya anggaran defisit. Pemerintah percaya diri untuk menyusun anggaran defisit karena mengandalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya. SiLPA terbentuk oleh pelampauan pendapatan dan penghematan belanja. Penelitian ini mencoba mengevaluasi efektivitas perolehan pendapatan daerah, penghematan belanja daerah, dan kesesuaian perencanaan anggaran melalui SiLPA. Alat analisis yang digunakan adalah rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kontribusi, dan standar defiasi untuk kurva normal Z. Hasil Analisis menunjukkan bahwa pendapatan daerah tidak efektif (93,9%), belanja daerah efisien (89,7%), dan berdasarkan besaran SiLPA yang terbentuk selama 8 tahun ditemukan nilai deviasi sebesar 74.612.747.053,27, dengan standar deviasi tersebut penganggaran daerah dinilai sesuai kecuali penganggaran tahun 2016. Kontributor utama bagi ketidakefektifan pendapatan daerah adalah Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Kontributor utama bagi penghematan belanja daerah adalah Belanja Langsung. Ketidakesesuaian perencanaan anggaran pada tahun 2016 karena terlalu tingginya SiLPA yang terbentuk sebesar Rp 216,4 milyar, melebihi batas atas kesesuaian. Ketidakesesuaian Anggaran Tahun 2016 disebabkan oleh terlalu tingginya tingkat efisiensi belanja daerah yang mencapai 124,6% ketika posisi pendapatan tidak efektif hanya sebesar 24,6%.

Kata Kunci: *SiLPA, anggaran defisit, pelampauan pendapatan, penghematan*

belanja, kesesuaian anggaran

Abstract: The West Sumbawa Regency Government for eight years from 2010 to 2017 compiled the *Regional Budget of Income and Expenditure (APBD)* in the form of a balanced budget in 2011, a surplus budget in 2015 and 2016, and a deficit budget in the rest of the years. The government is confident to draw up a deficit budget because it relies on the Previous Year's Budget Calculation Balance (SiLPA). SiLPA is formed by exceeding incomes and expenditures savings. This study tries to evaluate the effectiveness of obtaining regional incomes, the efficiency of regional expenditures, and the suitability of budget planning through SiLPA. The analytical tool used is the effectiveness ratio, efficiency ratio, contribution ratio, and the standard defiation for the Z normal curve. The analysis results show that regional income is ineffective (93.9%), regional expenditure is efficient (89.7%), and based on the amount of SiLPA formed over 8 years found a deviation value of 74,612,747,053.27, with that standard deviation the regional budgeting considered appropriate except for budgeting in 2016. The main contributor to the ineffectiveness of regional income was the Balancing Fund from the Central Government. The main contributor to the efficiency of regional expenditure is Direct expenditures. Inappropriate budget planning in 2016 due to the overly high SiLPA which was formed at Rp 216.4 billion, exceeding the upper limit of appropriacy. The 2016 budgeting inappropriacy is caused by the too high level of regional expenditure efficiency which reaches 124.6% when the ineffective income position is only 24.6%.

Keywords: *SiLPA, deficit budget, income exceeding, expenditure efficiency, budgeting appropriacy, West Sumbawa Regency.*

Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen hukum daerah yang paling jelas dalam menunjukkan perencanaan pembangunan daerah oleh Pemerintahan Daerah di samping dokumen hukum lainnya seperti RPJPD, RPJMD, dan sebagainya.

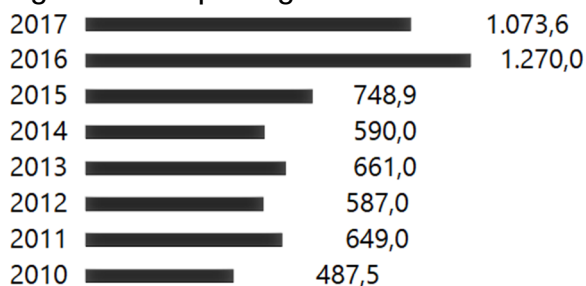
APBD pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, selain untuk mengarahkan arah

pembangunan di daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah bersama DPRD harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik.

Komponen utama APBD adalah

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Sedangkan komponen Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011) atau disebut dengan Pendapatan Transfer (menurut Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

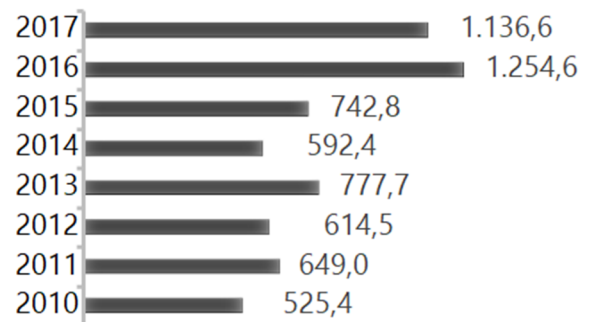
Catatan APBD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) selama sewindu, sejak tahun 2010 hingga tahun 2017, menunjukkan peningkatan pendapatan yang sangat signifikan seperti yang digambarkan pada grafik 1 berikut:



Grafik 1. Anggaran Pendapatan KSB 2010-2017 dalam milyar rupiah

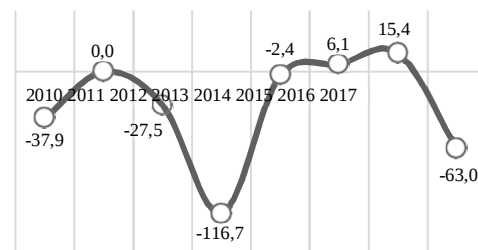
Anggaran Pendapatan naik dalam masa swindu sebesar 107% dengan laju kenaikan rata-rata 15% per tahun.

Besarnya pendapatan tersebut memberi peluang lebih leluasa bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun program pembangunannya. Program pembangunan tersebut dituangkan dalam Anggaran Belanja yang juga semakin meningkat dengan laju tingkat kenaikan yang sama dengan Anggaran Pendapatan seperti yang ditunjukkan dalam grafik 2 berikut:



Grafik 2. Anggaran Belanja KSB 2010-2017 dalam milyar rupiah

Grafik 2 menggambarkan laju fluktuasi belanja daerah yang mirip dengan laju pendapatan daerah. Dalam masa swindu Anggaran Belanja naik sebesar 106% dengan laju kenaikan rata-rata 15% per tahun.



Grafik 3. Surplus/Defisit APBD KSB 2010-2017 dalam milyar rupiah

Grafik 3 di atas mengungkap fakta bahwa Pemerintah Daerah KSB menyusun anggaran berimbang pada tahun 2011 dan anggaran surplus pada tahun 2015 dan 2016. Lima tahun yang lain, yakni tahun 2010, 2012, 2013, 2014, dan 2017 Pemerintah Daerah menganggarkan belanja yang lebih besar daripada anggaran pendapatannya. Anggaran yang disusun adalah anggaran defisit yang oleh Pemerintah memang diperkenankan dengan batas maksimal defisit yang diperbolehkan sebesar 5%.

Pertanyaannya adalah mengapa anggaran defisit diperbolehkan meskipun dengan batas atas yang kecil? Bagaimana Pemerintah Daerah menutupi defisit

anggarannya?

Komponen lain dari APBD adalah Pembiayaan, yakni penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Salah satu komponen Penerimaan Pembiayaan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya yang disingkat SiLPA (dengan huruf i kecil)¹ yang menjadi andalan Pemerintah Daerah untuk menutup defisit anggarannya.

SiLPA akan terbentuk jika APBD terlaksana tidak persis seperti yang dianggarkan. Dalam hal ini, pendapatan dan penerimaan pembiayaan harus lebih besar dari yang dianggarkan, atau belanja dan pengeluaran pembiayaan harus lebih kecil dari yang dianggarkan, atau gabungan antara kedua opsi di atas.

Pelampauan penerimaan pendapatan dan pembiayaan dan/atau penghematan belanja dan pengeluaran pembiayaan meskipun secara sekilas menunjukkan prestasi, namun dalam perspektif lain bisa dinilai sebagai kekurangtepatan dalam melakukan perencanaan anggaran. Hal inilah yang perlu dilakukan evaluasi tentang kesesuaian perencanaan APBD di Kabupaten Sumbawa Barat.

¹ SiLPA (dengan huruf I besar) adalah singkatan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran untuk tahun berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.

Metodologi Penelitian

Penelitian deskriptif ini mengkaji data runtun waktu APBD KSB beserta

realisasinya selama sewindu sejak tahun 2010 hingga tahun 2017 yang didapatkan dari Visualisasi Data APBD oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI yang diakses di laman www.djpk.kemenkeu.go.id/visual/ pada 15 Agustus 2019.

Data tersebut dikaji untuk mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya, serta kesesuaian perencanaannya dengan menggunakan rumus-rumus sebagai berikut:

$$1. \text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Skor kurang dari 100% berarti tidak efektif, skor sama dengan 100% berarti efektifitas berimbang, dan skor di atas 100% berarti efektif (Mahsun, 2009: 187)

$$2. \text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Skor kurang dari 100% berarti efisien, skor sama dengan 100% berarti efisiensi berimbang, dan skor di atas 100% berarti tidak efisien (Mahsun, 2009: 187).

$$3. \text{Kontribusi} = \frac{Px_i}{PSiLA} \times 100\%$$

Dimana Px_i : Variabel pembentuk a SiLPA

$PSiLA$: SiLPA

(Widodo, 1991 : 21).

$$4. \delta = \sqrt{\frac{\sum(x - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Dimana δ = Nilai deviasi

x = Nominal SiLPA terbentuk

n = Jumlah objek diteliti

(Sugiyono, 2011: 58)

Pada tingkat alpha 5% dicari nilai Z

alpha 2 sisi, dengan bantuan tabel z ditemukan nilai sebesar 1,96. Dengan nilai z tersebut ditentukan interval penerimaannya sebagai berikut:

$(\bar{x} - 1,96\sigma) \leq x \leq (\bar{x} + 1,96\sigma)$, berarti sesuai.

$(\bar{x} - 1,96\sigma) > x$ atau $(\bar{x} + 1,96\sigma) < x$, berarti tidak sesuai.

Hasil dan Pembahasan

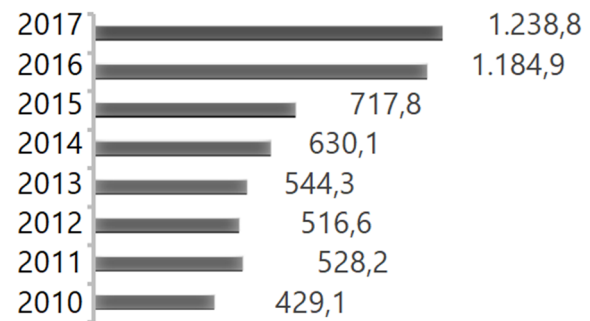
Hasil olahan data terhadap APBD KSB selama sewindu dapat dilihat pada grafik-grafik berikut:

Tabel 1. Efektivitas Pendapatan APBD KSB 2010 – 2017

TAHUN		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RASIO		88,0%	81,4%	88,0%	82,3%	106,8%	95,9%	93,3%	115,4%
TAFSIR		Tef	Tef	Tef	Tef	Ef	Tef	Tef	Ef
KONTR	PAD	14,1%	6,3%	91,6%	11,6%	3,7%	8,9%	-0,9%	78,0%
	DAPER	-46,7%	22,6%	60,4%	46,0%	102,2%	122,7%	45,9%	25,4%
	LAIN	132,6%	71,2%	-51,9%	42,5%	-5,8%	-31,6%	55,1%	-3,3%
Catatan		Tef = Tidak Efektif PAD : Pendapatan Asli Daerah Ef = Efektif DAPER : Dana Perimbangan LAIN : Lain-Lain Pendapatan yang sah							

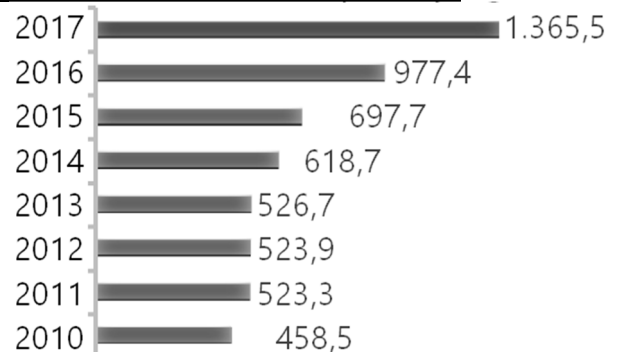
Tabel 1 menjelaskan bahwa upaya memperoleh pendapatan efektif pada tahun 2014 dan 2017 dengan rasio di atas 100%. Selebihnya tidak efektif. Jika dihitung reratanya maka rasio efektivitas pendapatan APBD KSB selama sewindu sebesar 93,9% yang berarti Tidak Efektif.

Kontributor utama bagi ketidakefektifan perolehan pendapatan selama sewindu adalah Lain-Lain Pendapatan yang Sah, diikuti oleh Dana Perimbangan.



Grafik 4. Realisasi Pendapatan KSB 2010-2017 dalam milyar rupiah

Realisasi perolehan pendapatan seringkali lebih kecil nominalnya dibandingkan dengan anggarannya, kecuali pada tahun 2014 dan 2017 yang realisasinya melampaui anggaran.



Grafik 5. Realisasi Belanja KSB 2010-2017 dalam milyar rupiah

Mengikuti irama fluktuasi realisasi pendapatan, realisasi belanja pun hampir selalu lebih kecil nominalnya dibandingkan dengan anggarannya, kecuali pada tahun 2014 dan 2017 yang realisasinya melampaui anggaran.

Tabel 2. Efisiensi Belanja APBD KSB 2010 – 2017

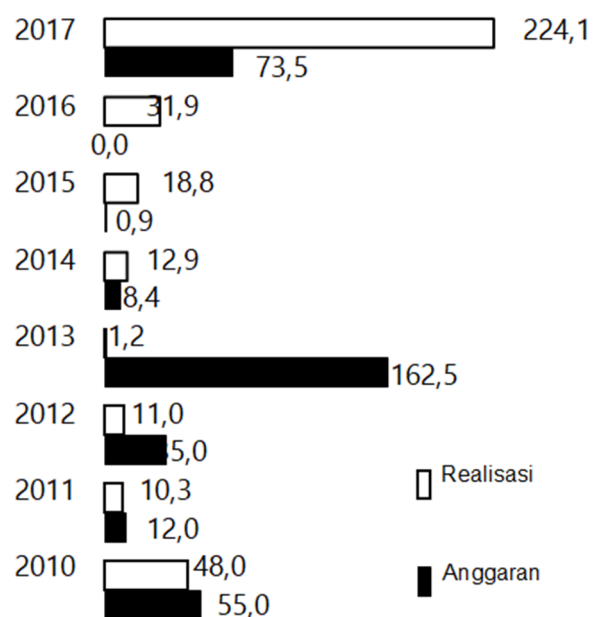
TAHUN		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RASIO		87,3%	80,6%	85,3%	67,7%	104,4%	93,9%	77,9%	120,1%
TAFSIR		En	En	En	En	TEn	En	En	TEn
KONTRI BUSI	BL	165,6%	92,7%	144,1%	95,9%	-92,3%	55,3%	71,5%	51,4%
	BTL	-65,6%	7,3%	-44,1%	4,1%	192,3%	44,7%	28,5%	48,6%
Catatan		TEn = Tidak Efisien BL = Belanja Langsung En = Efisien BTL = Brlanja Tidak Langsung							

Tabel 2 menjelaskan bahwa upaya efisiensi terjadi hampir setiap tahun dengan rasio di bawah 100% kecuali pada tahun 2014 dan 2017 yang tidak efektif. Jika dihitung reratanya maka rasio efisiensi belanja APBD KSB selama sewindu sebesar 89,7% yang berarti Efisien.

Kontributor utama bagi efisiensi belanja selama sewindu APBD KSB adalah Belanja Langsung.

Fakta tentang efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja di atas menjelaskan bahwa pada tahun ketidakefektifan perolehan pendapatan selalu diikuti oleh efisiensi belanja. Begitu pula sebaliknya, pada tahun dimana perolehan pendapatan efektif maka belanja menjadi tidak efisien. Fakta tersebut lazim, karena pada dasarnya pelaksanaan belanja bergantung kepada ketersediaan dana pendapatan.

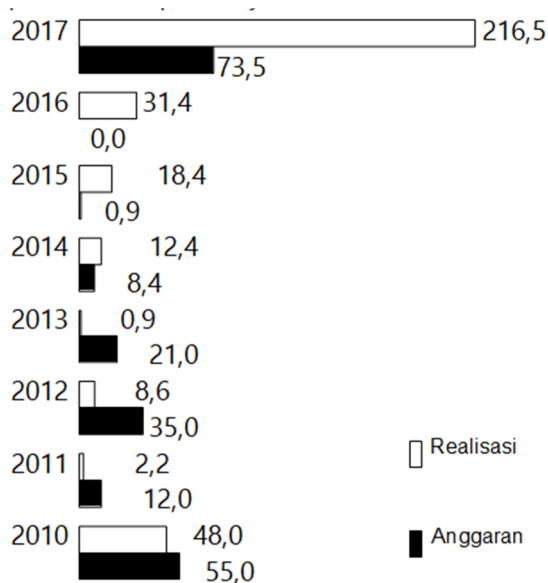
Efisiensi dalam hal ini dipahami sebagai suatu keharusan akibat terjadinya ketidakefektifan perolehan pendapatan.



Grafik 5. Penerimaan Pembiayaan KSB 2010-2017 dalam milyar rupiah

Pada empat tahun pertama Realisasi Penerimaan Pembiayaan APBD KSB selalu lebih rendah dari yang dianggarkan. Apalagi pada tahun 2013 harapan Pemerintah terhadap penerimaan sangat tinggi dan berakhir dengan realisasi yang sangat rendah. Baru sejak tahun 2014 realisasi penerimaan melampaui anggaran yang memang dipasang rendah, bahkan di tahun 2017 mengalami pelampauan yang sangat tinggi.

Salah satu komponen penerimaan pembiayaan APBD adalah SiLPA tahun sebelumnya. Untuk itu evaluasi terhadap SiLPA disertakan dalam evaluasi terhadap penerimaan pembiayaan.



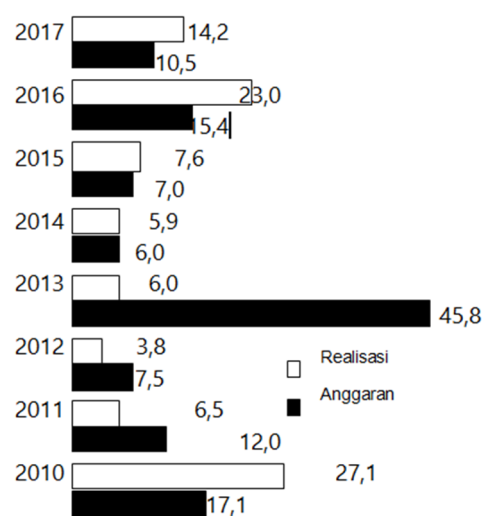
Grafik 6. SiLPA Tahun-1 APBD KSB 2010-2017 dalam milyar rupiah

Fluktuasi SiLPA Tahun-1 sangat mirip dengan fluktuasi Penerimaan Pembiayaan APBD KSB selama sewindu, baik pada anggaran maupun realisasinya. Hal ini mengisyaratkan besarnya kemungkinan bahwa SiLPA merupakan kontributor utama bagi Penerimaan Pembiayaan.

	TAHUN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PENERIMAAN	RASIO	87,3%	85,5%	31,4%	0,7%	152,4 %	1994,0%	∞	304,8 %
	TAFSIR	Tef	Tef	Tef	Tef	Ef	Ef	Ef	Ef
SiLPA	RASIO	87,3%	18,3%	24,5%	4,5%	147,2 %	1943,3%	∞	294,5 %
	TAFSIR	Tef	Tef	Tef	Tef	Ef	Ef	Ef	Ef
	KONTRI BUSI	100,0%	563,1%	110,0%	12,4%	90,0%	97,3%	98,4%	95,0%
Catatan:									
Tef		= Tidak Efektif							
Ef		= Efektif							

Tabel 3. Efektivitas Penerimaan Pembiayaan APBD KSB 2010 – 2017

Tabel 3 mengukuhkan temuan bahwa penerimaan pembiayaan tidak efektif pada tahun 2010 hingga tahun 2013 dan menjadi efektif pada empat tahun berikutnya. Tabel 3 juga membenarkan dugaan bahwa SiLPA Tahun sebelumnya merupakan kontributor utama bagi penerimaan pembiayaan APBD KSB, baik di saat tidak efektif maupun di saat efektif.



Grafik 7. Pengeluaran Pembiayaan KSB 2010-2017 dalam milyar rupiah

Pengeluaran pembiayaan APBD

KSB selama sewindu lebih fluktuatif daripada penerimaan pembiayaan. Pengeluaran tertinggi yang dianggarkan

terjadi pada Tahun 2013 namun rendah realisasinya.

TAHUN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RASIO	158,5%	54,2%	50,0%	13,2%	98,1%	109,1%	149,6%	135,6%
TAFSIR	Ten	En	En	En	En	Ten	Ten	Ten
Catatan: TEn = Tidak Efisien En = Efisien								

Tabel 4. Efisiensi Pengeluaran Pembiayaan APBD KSB 2010 – 2017

Jika pada tabel-tabel tentang efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja ditemukan korelasi positif antara ketidakefektifan pendapatan dengan efisiensi belanja, maka Tabel 4 menunjukkan bahwa korelasi tersebut tidak terjadi antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Tahun 2010 ketika penerimaan pembiayaan tidak efektif pengeluaran pembiayaan pun tidak efisien. Sebaliknya di tahun 2014, ketika penerimaan pembiayaan efektif ternyata pengeluaran pembiayaan efisien.

Secara keseluruhan, pengeluaran pembiayaan APBD KSB selama sewindu dinilai efisien.

Jika kembali kepada Tabel 1 dan Tabel 2, akan ditemukan adanya selisih antara rasio ketidakefektifan pendapatan daerah dengan rasio efisiensi belanja daerah. Rerata ketidakefektifan pendapatan daerah KSB selama sewindu sebesar 93,9%. Rerata realisasi pendapatan yang diterima sebesar Rp 723,7 milyar. Jika rerata rasio ketidakefektifan dikalikan dengan rerata pendapatan yang diterima didapatkan nominal sebesar Rp 679,5 milyar.

Selanjutnya rerata rasio efisiensi belanja daerah selama sewindu sebesar

89,7%, sedangkan rerata realisasi belanja sebesar Rp 711,5%. Bila dikalikan akan didapatkan nominal sebesar Rp 637,9 milyar. Selisih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja rata-rata sebesar Rp 41,6 milyar. Inilah saldo yang dihasilkan dari pengelolaan keuangan selama sewindu. Untuk apakah dana tersebut?

Data APBD selama sewindu menunjukkan realisasi SiLPA yang dibentuk oleh pengelolaan APBD tahun 2010 hingga 2017, sehingga didapatkan data SiLPA riil untuk tahun selanjutnya sebagai berikut:

TAHUN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rerata
SILPA	-8,5	8,7	-0,1	12,7	18,4	31,4	216,4	83,1	45,3

Tabel 5. Realisasi SiLPA Terbentuk untuk Tahun +1 (dalam milyar rupiah)

Antara rerata saldo yang dihasilkan dari pengelolaan keuangan sebesar Rp 41,6 milyar dengan rerata realisasi SiLPA yang terbentuk untuk Tahun +1 sebesar Rp 45,3 milyar memiliki kedekatan. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa efisiensi belanja yang selisih rasionya dari 100% lebih besar daripada selisih rasio ketidakefektifan pendapatan dari 100% tersebut memiliki tujuan pembentukan SiLPA untuk Tahun +1.

SiLPA akan terbentuk dari hasil penjumlahan Pelampauan Pendapatan

(termasuk Penerimaan Pembiayaan) dan Penghematan Belanja (termasuk Pengeluaran Pembiayaan). Pada Tabel 6

berikut tergambar kontribusi pembentukan SiLPA.

TAHUN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SiLPA Terbentuk	-8,5	8,7	-0,1	12,7	18,4	31,4	216,4	83,1
Pelampauan	Rp	-65,3	-122,5	-94,4	-278,1	44,5	-13,1	-53,3
Pendapatan	%	770,6%	-1416,0%	173093,7%	-2193,3%	242,4%	-41,9%	-24,6%
Penghematan	Rp	56,8	131,2	94,3	290,8	-26,2	44,5	269,6
Belanja	%	-670,6%	1516,0%	-172993,7%	2293,3%	-142,4%	141,9%	124,6%

Tabel 6. Kontributor Pembentukan SiLPA (dalam milyar rupiah)

Tabel 6 menjelaskan bahwa pada tahun 2014 dan 2017 Pelampauan Pendapatan memberi kontribusi positif terhadap pembentukan SiLPA. Enam tahun yang lain terjadi kebalikannya, Penghematan Belanja memberikan kontribusi positif sedangkan Pelampauan

Pendapatan justru mengurangi besaran SiLPA.

Jika ditelusuri lebih jauh maka kontribusi Penghematan dalam pembentukan SiLPA dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

TAHUN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Penghematan	56,8	131,2	94,3	290,8	-26,2	44,5	269,6	-232,7
Belanja	Rp	110,6	116,5	130,6	240,8	24,2	25,0	198,2
Langsung	%	194,8%	88,8%	138,4%	82,8%	-92,7%	56,1%	73,5%
Belanja	Rp	-43,8	9,1	-40,0	10,2	-50,5	20,2	79,1
Tak Langsung	%	-77,2%	7,0%	-42,4%	3,5%	193,1%	45,4%	29,3%
Pengeluaran	Rp	-10,0	5,5	3,8	39,8	0,1	-0,6	-7,6
Pembiayaan	%	-9,0%	4,7%	2,9%	16,5%	0,5%	-2,6%	-3,9%

Tabel 7. Kontributor Penghematan Pembentuk SiLPA (dalam milyar rupiah)

Tabel 7 mengungkap bahwa kontributor utama bagi Penghematan adalah Efisiensi Belanja Langsung dengan porsi rata-rata 74%.

Adapun yang berkontribusi bagi Pelampauan Pendapatan yang pernah terjadi di tahun 2014 dan 2017 dapat dilihat pada Tabel 8 berikut:

TAHUN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pelampauan	-65,3	-122,5	-94,4	-278,1	44,5	-13,1	-53,3	315,8
Pendapatan	Rp	-8,2	-7,5	-64,4	-13,5	1,5	-2,8	0,8
Asli Daerah	%	12,6%	6,2%	68,3%	4,9%	3,3%	21,0%	-1,5%
Dana	Rp	27,2	-27,3	-42,5	-53,7	41,0	-38,1	-39,1
Perimbangan	%	-41,7%	22,3%	45,0%	19,3%	92,0%	289,9%	73,3%
Lain-Lain	Rp	-77,3	-86,0	36,5	-49,6	-2,3	9,8	-46,9
Yang Sah	%	118,5%	70,2%	-38,7%	17,8%	-5,3%	-74,6%	88,0%
Penerimaan	Rp	-7,0	-1,7	-24,0	-161,3	4,4	17,9	31,9
Pembiayaan	%	10,7%	1,4%	25,4%	58,0%	9,9%	-136,3%	-59,9%

Tabel 8. Kontributor Pelampauan Pembentuk SiLPA (dalam milyar rupiah)

Tabel 8 mengungkap bahwa kontributor utama bagi Pelampauan adalah Efektivitas Dana Perimbangan dengan porsi rata-rata 64,2%.

Ada sesuatu yang menonjol pada ungkapan fakta pada Tabel 6 di atas, yaitu pada kolom tahun 2016 terlihat efisiensi yang sangat besar mencapai Rp 269,6 milyar (124,6%) ketika posisi pendapatan tidak efektif sebesar Rp 53,3 milyar (24,6%). Selisih antara keduanya sangat jauh dibanding dengan selisih yang terjadi pada tahun anggaran lainnya. Dari penghematan tersebut ternyata efisiensi Belanja Langsung memiliki porsi sebesar 73,5% atau Rp 198,2 milyar.

SiLPA yang terbentuk pada tahun 2016 sangat tinggi, yakni sebesar Rp 216,4 milyar. Dana tersebut memang digunakan di tahun 2017. Namun dari perspektif perencanaan, apalagi jika dilihat dari fungsi APBD bagi pembangunan daerah maka efisiensi tersebut tidak tepat.

SiLPA sebagai hasil dari pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran dapat digunakan untuk mengukur apakah suatu perencanaan APBD sudah sesuai atau tidak. Hal utama yang harus diketahui adalah nilai deviasi SiLPA.

Dalam penelitian ini APBD runtut waktu yang dikaji adalah APBD sewindu sejak tahun 2010 hingga tahun 2017. Dalam hal ini $n = 8$. Rerata nomina SiLPA selama sewindu adalah Rp 45.250.948.615,88

Mengikuti rumus pencarian deviasi (Sugiyono, 2011: 58) ditemukan nilai deviasi sebesar Rp 74.612.747.053,27

Pada tingkat alpha 5% dicari nilai Z alpha 2 sisi, dengan bantuan tabel Z ditemukan nilai sebesar 1,96. Dengan nilai

Z tersebut ditentukan interval penerimaannya sebagai berikut:

Perhitungan Batas Bawah dan Batas Atas interval kesesuaian dengan input seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut:

$$(\bar{x} - 1,966) \leq x \leq (\bar{x} + 1,966), \text{ berarti sesuai.}$$

$$(\bar{x} - 1,966) > x \text{ atau } (\bar{x} + 1,966) < x, \text{ berarti tidak sesuai.}$$

1. $1,966 = 1,96 \times 74.612.747.053,27$
 $= 146.240.984.224,41$
2. Batas Bawah $\bar{x} - 1,966 = 45.250.948.615,88 - 146.240.984.224,41$
 $= -100.990.035.608,53$
3. Batas Atas $\bar{x} + 1,966 = 45.250.948.615,88 + 146.240.984.224,41$
 $= 191.491.932.840,28$

Hasil perhitungan kesesuaian tersebut tertera pada tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9. Penilaian Kesesuaian SiLPA

TAHUN	SiLPA	POSISI	PERNYATAAN
2010	Rp 8.471.040.342,00	Di dalam interval	Sesuai
2011	Rp 8.652.424.743,00	Di dalam interval	Sesuai
2012	Rp 54.517.573,00	Di dalam interval	Sesuai
2013	Rp 12.678.821.901,00	Di dalam interval	Sesuai
2014	Rp 18.364.492.269,00	Di dalam interval	Sesuai
2015	Rp 31.372.210.653,00	Di dalam interval	Sesuai
2016	Rp 216.373.690.024,00	Di atas Batas Atas	Tidak Sesuai
2017	Rp 83.091.507.252,00	Di dalam interval	Sesuai

Dari tabel 9 terlihat bahwa Perencanaan APBD KSB selama sewindu (2010 – 2017) dinyatakan **Sesuai** karena SiLPA yang terbentuk berada di dalam interval kesesuaian, kecuali APBD pada tahun 2016 yang dinyatakan **Tidak Sesuai**

karena SiLPA yang terbentuk nilainya lebih besar daripada nilai Batas Atas.

Melihat evaluasi kesesuaian penganggaran melalui SiLPA terungkap bahwa tindakan efisiensi belanja daerah dapat dibenarkan selama menjadi keharusan akibat ketidakefektifan memperoleh pendapatan dan untuk membentuk SiLPA dalam batas yang wajar.

Simpulan Dan Saran

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam masa

Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Safruddin Abdul, 2010, *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara.

Baay, Tri Adiyanto, 2011, *Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran di Provinsi Maluku Utara Tahun 2009*, Tesis S2 Magister Ekonomika Pembangunan, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.

Balitbangda Provinsi NTT, 2008, *Analisis tentang Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Kupang, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan RI, 2019, *Visualisasi Data APBD*,

sewindu, sejak tahun 2010 sampai tahun 2017 dinilai tidak efektif dalam perolehan pendapatan daerah seperti yang dianggarkan, namun efisien dalam belanja daerah.

Efisiensi belanja daerah tidak identik sebagai sebuah prestasi jika terdapat hal-hal yang memaksa, seperti perolehan pendapatan daerah yang tidak mencapai target anggaran, ketidakterlaksanaan program, atau upaya yang berlebihan dalam pembentukan SiLPA.

www.djpk.kemenkeu.go.id/visual/
diakses pada 15 Agustus 2019

Halim Abdul, Damayanti, 2007, *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Khusaini, Moh., 2018. *Keuangan Daerah*. Malang, UB Press.

Mahsun, M., 2009, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta, BPFE-UGM

Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Andi.

Nurkholis, dan Moh. Khusaini. 2019. *Penganggaran Sektor Publik*, Malang, UB Press.

Rinusu dan Sri Mastuti. 2003. *Panduan Praktis Mengontrol APBD*. Jakarta,

Civic Education and Budget Transparency Advocation (Ciba) dan Friedrich Ebert Stiftung (FES).

Sekretariat Negara RI, 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, <http://www.setneg.go.id>.

Sekretariat Negara RI, 2019. *Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, <http://www.setneg.go.id>.

Sidharta, Eka Ananta, 2008, *Analisis Kinerja Keuangan Pemda dengan Pendekatan Analisis Rasio Keuangan pada APBD di Kota Malang*, Forum Penelitian Tahun 20, Nomor 2, Desember 2008

Sugiyono, 2011. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung, CV. Alfabeta.

Thamsil, M, 2012, *Evaluasi SiLPA Pada Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat*, Tesis S2 Magister Manajemen, Mataram, Universitas Mataram.

Wargono, 2008, *Statistik Inferensi Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Kedua, Yogyakarta, Mataram University Press.

Wicaksono, Bakti, 2012, *Analisis Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008-2010*, Tesis S2 Magister Ekonomika Pembangunan, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada

Wiryati, Luh Wayan, 2009. *“Evaluasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada perhitungan APBD Kabupaten Lombok Barat”*, Tesis S2 Magister Manajemen, Mataram, Universitas Mataram.